

**POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA DAERAH TUJUAN  
WISATA BAHARI DI KABUPATEN KARANGASEM**

I Wayan Mudana

Jurusan Sosiologi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja  
Email: Mudanawayan935@yahoo.co.id

Kajian ini bertujuan untuk: mendeskripsikan tanggapan masyarakat terhadap model pemberdayaan masyarakat, bentuk diversifikasi usaha yang dikembangkan, bentuk kelembagaan yang dikembangkan, dan berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan di Kabupaten Karangasem. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Sehubungan dengan hal itu maka teknik penentuan informan menggunakan *porposive snowball*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan triangulasi secara berkelanjutan.

Berdasarkan atas hal itu dapat dikemukakan bahwa masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap model pola pemberdayaan yang dikembangkan, masyarakat mengembangkan berbagai bentuk diversifikasi usaha sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam memanfaatkan peluang yang ada, kelembagaan yang dikembangkan dalam bentuk kelembagaan mengembangkan kelembagaan kelompok sadar wisata, *Diving Center* (Pelatihan/tutorial, penyewaan, pendampingan/ pemandu wisata), kelompok nelayan pengangkut wisatawan, pelestarian terumbu karang, *pecalang* segara, dan Pokmaswas serta Badan Usaha Milik Desa. Pengembangan berbagai kelembagaan tersebut dilakukan melalui proses dialog antar kelompok masyarakat dan *pecalang* segara. Memang harus diakui ada beberapa hambatan dalam pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan, diantaranya regulasi, dukungan infrastruktur, wawasan masyarakat tentang pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan, terbatasnya modal usaha yang dimiliki, dan keterbatasan atraksi wisata yang ada di kawasan pesisir Kabupaten Karangasem

Kata Kunci: pemberdayaan, wisata bahari, berkelanjutan

**POLICY OF COMMUNITY EMPOWERMENT ON A PURPOSE REGION  
TOURISM BAHARI IN KARANGASEM DISTRICT**

This study aims to: describe the community's response to the community empowerment model, the form of business diversification developed, the developed institutional forms developed, and the constraints faced in realizing the development of sustainable marine tourism in Karangasem regency. The approach used in this study is qualitative. In relation to that, the technique of determining informants using *porposive snowball*. Data collection is done by observation, interview, and documentation. While the data analysis is done with triangulation in a sustainable manner.

Based on the above it can be argued that the community responded positively to the model of empowerment pattern developed, the community developed various forms of business diversification as a form of community participation in exploiting the existing opportunities, institutional developed in the form of institutional develop the tourism conscious group, *Diving Center*/tutorials, rentals, assistance/tour guides), groups of tourists transporters, coral reef conservation, seagrasses, and Pokmaswas and Village Owned Enterprises. The development of various institutions is done through the process of dialogue between community groups and *pecalang* segara. It must be acknowledged that there are some obstacles in the development of sustainable marine tourism, including regulation, infrastructure support, community

insight on the development of sustainable marine tourism, limited business capital owned, and limited tourist attractions in the coastal area of Karangasem regency

Keywords: empowerment, marine tourism, sustainable

## PENDAHULUAN

Pulau Bali merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman potensi. Hal inilah yang menjadikan daerah Bali sebagai wisata yang sangat menarik (Covarrubias, 2013). Keberadaan daerah Bali sebagai daerah wisata dalam perspektif *Rwa Binneda* tentu saja ada sisi positif dan sisi negatif bagi dinamika sosial, kultural, dan ekonomi masyarakat Bali. Fenomena semacam ini menarik bagi pemerhati masalah sosial-humaniora. Hal ini dapat disimak dari adanya berbagai kajian terkait dengan keberadaan Bali sebagai daerah wisata. Seperti kajian (Atmadja, 1993; Mudana, 1998; Pujaastawa, dkk, 2005; Najib, 2006; Anom, dkk., 2010; Pitana, 2011). Sehubungan dengan hal itulah kajian tentang Pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Tujuan Wisata Bahari Di Kabupaten Karangasem diupayakan. Permasalahan yang dikaji difokuskan pada permasalahan utama, yaitu: tanggapan masyarakat terhadap pola pemberdayaan masyarakat, bentuk diversifikasi usaha yang dikembangkan masyarakat pesisir, bentuk kelembagaan yang dikembangkan, dan hambatan-hambatan dalam-dalam menunjang pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan di Kabupaten Karangasem. Kajian ini menggunakan beberapa teori yang terkait dengan pembangunan pariwisata berkelanjutan, pemberdayaan dan konstruksi sosial dan kontrol sosial. Pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan yang direncanakan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan kehidupan manusia. Dalam dinamika pembangunan tidak jarang timbul berbagai permasalahan pembangunan. Sehubungan dengan hal itulah belakangan ini muncul pemikiran kritis yang melahirkan pengintegrasian *sustainability* atau keberlanjutan dalam proses pembangunan, khususnya dalam hal ini pembangunan pariwisata berkelanjutan. *Sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan ini diwujudkan melalui keterkaitan yang tepat antara alam, aspek soio-ekonomis, dan kultur.

Pemikiran pembangunan berkelanjutan terus mendapat pengkritisan guna memperkecil Dampak negatif dari pembangunan. Sikap yang demikian itu tampaknya menjadi input bagi konferensi *Earth Summit* yang diselenggarakan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 1992 (Tjokrowinoto, 1996:18). Pada konferensi tersebut paradigma pembangunan berkelanjutan diterima sebagai sebuah agenda politik pembangunan untuk semua negara di dunia. Pada kesempatan itu fokus perhatiannya terutama menyangkut isu polusi, isu sumber alam, isu perkotaan, dan isu manajemen.

Cita-cita dan agenda utama pembangunan berkelanjutan tidak lain adalah upaya untuk menyinkronkan, mengintegrasikan, dan memberi bobot yang sama bagi tiga aspek utama pembangunan, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial-budaya, dan aspek lingkungan hidup. Untuk itu ada tiga prinsip utama pembangunan berkelanjutan yang harus diperhatikan dan dioperasionalkan sebagai sebuah politik pembangunan, yaitu: prinsip demokrasi, prinsip keadilan, dan prinsip keberlanjutan. Hanya dengan perubahan pendekatan politik pembangunan seperti itu bisa dijamin bahwa cita-cita dan agenda pembangunan berkelanjutan bisa dicapai.

Dalam hal inilah diperlukan adanya suatu sinergi positif antara tiga kekuatan utama, yaitu negara dengan kekuatan politik, sektor swasta dengan kekuatan ekonomi, dan masyarakat warga dengan kekuatan moral. Melalui kerja sama positif dan produktif dalam semangat saling mengontrol dan mengimbangi untuk memungkinkan proses dan tujuan pembangunan dapat terwujudkan (Keraf, 2005:182).

Pembangunan berkelanjutan senantiasa menghendaki peningkatan kualitas hidup manusia, dan selalu berorientasi jangka panjang dengan prinsip-prinsip keberlanjutan hidup manusia dan lingkungannya di masa sekarang dan akan datang. Dalam hubungan itulah berbagai kearifan lokal/kearifan tradisional perlu diakomodir dalam pembangunan.

Menurut Keraf, kearifan tradisional adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Jadi, kearifan tradisional ini bukan hanya menyangkut pengetahuan dan pemahaman masyarakat adat tentang manusia dan bagaimana relasi yang baik di antara manusia, melainkan juga menyangkut pengetahuan, pemahaman dan adat kebiasaan tentang manusia, alam dan bagaimana relasi di antara semua penghuni komunitas ekologis harus dibangun (2005:289).

Untuk mewujudkan konsepsi pembangunan berkelanjutan diperlukan adanya proses pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan kajian yang dilakukan oleh S. Amanah dalam kajiannya tentang Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir (2010); Dewi dalam kajiannya tentang Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali (2013); Dwiyanto (2011) mengkaji tentang Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Sinergi Alam Pengelolaan Sampah Perkotaan; Arieta (2010) mengkaji tentang *Community Based Tourism*.

Pada Masyarakat Pesisir; Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi; Citra (2017) mengkaji tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan Ekowisata Wilayah

Pesisir di Kabupaten Buleleng; Amanah (2010) mengkaji tentang Peran komunikasi Pembangunan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir; Bagja (2016) mengkaji tentang Masyarakat Pesisir di Kawasan Wisata Bahari Pantai Pandawa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali; Elyazar (2007) mengkaji tentang Dampak Aktivitas Masyarakat Terhadap Tingkat Pencemaran Air Laut Di pantai Kuta Kabupaten Badung Serta Upaya Pelestarian Lingkungan.

Proses pemberdayaan pada dasarnya merupakan proses konstruksi sosial. Konsep konstruksionisme diperkenalkan oleh sosiolog interpretatif, Peter L. Berger dan Thomas Luckman. Mereka banyak menulis karya dan menghasilkan tesis mengenai konstruksi sosial atas realitas. Realitas sosial terbentuk secara sosial dan realitas sosial baru memiliki makna ketika realitas sosial tersebut dikonstruksi dan dimaknai secara subjektif oleh orang lain sehingga memantapkan realitas tersebut secara objektif. Oleh karena itu, setiap orang berpeluang melakukan konstruksi yang berbeda-beda atas suatu realitas. Teori konstruksi sosial menyatakan bahwa realitas kehidupan sehari-hari memiliki dimensi subjektif dan objektif. Tesis utamanya adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus-menerus. Proses dialektis tersebut mempunyai tiga momen. eksternalisasi, obyektivasi, internalisasi (Berger dan Luckman, 1990: 185-233; Riyanto, 2009: 112). Konstruksi sosial sangat penting artinya dalam dinamika kehidupan individu dan masyarakat karena, melalui proses konstruksi sosial, aktor merasakan, memikirkan, dan membangun struktur serta kemudian bertindak berdasarkan struktur yang dibangunnya (Ritzer dan Goodman, 2005: 518-523). Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan, modal manusia, dan sosial, kultural enantiasa keberadaannya sangat penting (Nugroho, 1997: 7). Di samping itu dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan juga dipentingkan adanya mekanisme kontrol sosial. Kontrol sosial pada dasarnya merupakan suatu komponen penting dalam relasi antara kuasa, sehingga perilaku anggota masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki. Dalam pengkajian tentang kontrol sosial tampaknya penting disimak pemikiran Foucault tentang *Discipline* dan *Punish* (Foucault, 1997: 22-31). Sarana kontrol sosial yang diterapkan oleh organisasi, menurut Etzioni (1985:83), dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori analitik, yaitu: fisik, material, atau simbolik.

Untuk memantapkan proses pengendalian sosial, masyarakat terus mengupayakan penyosialisasian berbagai mekanisme pengendalian sosial guna keterwujudan dari konsepsi pembangunan pariwisata yang keberlanjutan

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sehubungan dengan hal itu maka teknik penentuan informan menggunakan *porposive snowball*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan triangulasi secara berkelanjutan (Moleong, 1989).

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan pada masyarakat pesisir di Kabupaten Karangasem diperlukan pemahaman tentang konsep pemberdayaan masyarakat. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep utama dalam sosiologi-antropologi pembangunan. Pemberdayaan memiliki kebermaknaan yang sangat berarti terutama bagi kelompok renta dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehingga mampu menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkannya meningkatkan pendapatan. Serta memiliki kemampuan dalam berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan-keputusan dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Secara teoritis dalam pemberdayaan masyarakat ada tiga model yang umum dilakukan, yaitu: (1) model pengembangan masyarakat lokal; (2) model perencanaan sosial; dan (3) model aksi sosial (Suharto, 2005: 42). Pada masyarakat pesisir di Kabupaten Karangasem, ketiga model pemberdayaan tersebut diterapkan, namun yang paling dominan adalah model pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam proses pemberdayaan guna terwujudnya kemandirian, integrasi masyarakat dengan lingkungan sosiokultural dan alam sekitarnya melalui peningkatan kemampuannya. Hal itu dilakukan baik kepada seluruh masyarakat maupun pada beberapa bagian masyarakat melalui kerja sama antara kelembagaan masyarakat *Desa Pakraman*, *Desa Dinas* atau kelompok-kelompok fungsional yang ada pada masyarakat dengan pihak ketiga. Berpijak dari hal itu, strategi pemberdayaan yang dikembangkan pada masyarakat pesisir Kabupaten Karangsem Pada umumnya cenderung menggunakan strategi aras *mezzo*, namun dalam hal-hal tertentu juga digunakan strategi *mikro* dan *makro*. Pengembangan strategi ini terlihat dari upaya pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok anggota masyarakat yang tergabung dalam satuan organisasi tertentu. Pemberdayaan semacam ini menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok umumnya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapinya.

Tanggapan masyarakat terhadap pola pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pengembangan wisata bahari berkelanjutan sangat positif. Fenomena ini dapat disimak dari inisiatif dan keterlibatan aktif masyarakat desa dalam menanggapi pengembangan kawasan tersebut sebagai daerah wisata. Tanggapan terhadap hal itu dilakukan dalam suatu forum rembug atau *sangkepan desa*. Forum tersebut merupakan forum yang terbuka bagi dialog antar anggota masyarakat dalam menetapkan suatu keputusan. Dalam forum tersebut hadir tokoh-tokoh masyarakat dan anggota masyarakat pada umumnya. Melalui rembug desa semacam itu diungkapkan berbagai permasalahan yang dihadapi dan diupayakan alternatif model pemecahan yang disepakati. Dalam konteks pengembangan pariwisata misalnya, disepakati bahwa setiap pengembang pariwisata dalam perekrutan tenaga kerja harus mengutamakan tenaga kerja lokal; setiap pengembang pariwisata ikut berkontribusi terhadap pembangunan masyarakat desa.

Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengembangan kawasan tersebut sebagai daerah tujuan wisata juga dapat dilihat dari inisiatif masyarakat lokal dalam mengembangkan dan memberdayakan kelompok nelayan dan *pecalang segara*. Organisasi ini merupakan hasil kreativitas masyarakat dalam mengoptimalkan keberfungsian dari organisasi *pecalang* yang sudah ada di bawah *Desa Pakraman*. Hal ini sejalan dengan adanya proses transformasi *Desa Pakraman* sebagaimana diungkapkan oleh Pitana (1998). Keberfungsian dari organisasi ini telah mengantarkan Desa Tulamben sebagai desa model dalam pengembangan pariwisata yang mendukung pelestarian terumbu karang dengan melibatkan partisipasi aktif dari tiga pilar masyarakat yaitu masyarakat sipil, masyarakat ekponomi/pengusaha dan masyarakat politik/pemerintah.

Pemberdayaan masyarakat tentu saja memanfaatkan berbagai ruang sosial yang dimiliki masyarakat setempat. Ruang ruang sosial merupakan suatu arena dalam proses kontruksi sosial. Adapun ruang-ruang sosial yang dimanfaatkan dalam mengonstruksi atau memberdayakan masyarakat diantaranya adalah *paruman Desa Pakraman* atau pertemuan *Desa Pakraman*, aktivitas upacara keagamaan, dan pertemuan-pertemuan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa. Di samping itu, juga memanfaatkan kelembagaan pendidikan yang ada di desa tersebut. Dengan demikian berbagai potensi kelembagaan merupakan ruang sosial yang strategis bagi proses pengonstruksiaan/pemberdayaan masyarakat baik dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, pengintegrasian sosial/keharmonisan hubungan antar anggota masyarakat, penguatan kehidupan ekonomi dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Proses semacam itu tentu saja pelaksanaannya sangat tergantung dari peran kelembagaan desa dinas dan kelembagaan *Desa Pakraman*.

Dalam pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karangasem sebagai daerah tujuan wisata tentu juga terkait dengan peranan iklan sebagai media promosi. Praktik kuasa dalam media iklan tersebut tentu saja terkait dengan keberhasilan proses pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk kemampuan membuat iklan dan mempermaikan berbagai modal komunitas yang dimilikinya, sehingga memperkuat kuasa dalam iklan yang dipajangkannya (Badaruddin, 2005). Upaya semacam itu tentu merupakan upaya yang sangat positif bagi pelestarian lingkungan dan sekaligus juga berkontribusi bagi pengembangan pariwisata bahari yang berkearifan lingkungan di Kabupaten Karangasem.

Pengembangan berbagai potensi alam dan sosiokultural masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan diperlukan adanya sentuhan dari berbagai kelompok masyarakat. Dalam konteks ini keterlibatan masyarakat politik, ekonomi dan sipil merupakan hal yang sangat penting, baik dalam menggali berbagai potensi wisata, mengembangkannya, maupun dalam memeliharanya (Bocock, 2007: 27). Partisipasi dari ketiga kelompok ini terlihat jelas di kawasan wisata Tulamben, Amed, dan Candi Dasa. Keberlanjutan partisipasi ketiga kelompok masyarakat ini dalam pengembangan wisata bahari tentu saja terkait dengan kondisi kualitas sumber daya manusia masyarakat setempat. Dalam pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan, kualitas sumber daya manusia setempat sangat menentukan dalam proses dialog dan kolaborasi dengan masyarakat lainnya. Hal itu menurut Bourdieu, ditentukan oleh “kemelek hurufan budaya” (*cultural literacy*), yaitu pengetahuan akan sistem-sistem makna dan kemampuannya untuk menegosiasikan sistem-sistem itu dalam berbagai konteks budaya (Aryani, 2003). Hal ini sangat penting disadari lebih-lebih dalam era globalisasi, pasar bebas, adanya perubahan tren pariwisata dan tidak jelasnya regulasi untuk melindungi masyarakat Bali dari gempuran tenaga kerja asing. Sehubungan dengan hal itu, masyarakat Tulamben dan masyarakat di kawasan wisata Candi Dasa, berusaha memberdayakan sumber daya manusianya dan membuat regulasi dalam melindungi sumber daya manusia setempat sehingga tidak menjadi penonton di negeri sendiri. Upaya pemberdayaan juga terlihat dari program yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Karangasem berusaha memberikan pembinaan kepada masyarakat di kawasan pesisir. Pembinaan yang dilakukan meliputi pengembangan kemampuan konservasi kawasan pesisir dan laut, memfasilitasi diskusi kelompok mengenai strategi pengelolaan pariwisata kawasan pesisir dan laut, pembuatan peraturan perlindungan terhadap kawasan pesisir, bersama masyarakat dan Kelembagaan Swadaya Masyarakat mengembangkan terumbu karang, melakukan

pembinaan terhadap pendidikan sadar wisata dengan menyoasar kelompok nelayan dan *sekeha teruna-teruni* di sekitar kawasan pengembangan wisata bahari.

Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mendukung pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan juga dilakukan oleh pihak pengusaha hotel, melalui kelembagaan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Karangasem. Hal ini dapat dilihat dari keikutsertaannya dalam mengembangkan terumbu karang di kawasan pesisir. Dalam pengembangan terumbu karang di kawasan pesisir PHRI melalui hotel-hotel yang ada di kawasan itu ikut terlibat secara langsung. Demikian pula dalam kegiatan-kegiatan pengembangan pengelolaan pariwisata kawasan pesisir dan laut. Hal ini dapat disimak dari keikutsertaan *Emerald Tulamben Beeach, Matahari Tulamben Resort, Amed Dram Hotel Kerti Beach Bungalows, Akasa Villa Tulamben*, dan *Organisasi Dive Guide* dalam pelestarian terumbu karang. Kontribusi masyarakat sipil dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dapat disimak dari keikutsertaan dari Kelembagaan Swadaya Masyarakat *Conservation Internasional Indonesia*, dan *Coral Reef Alliance* dalam memberikan pendampingan dan mengedukasi masyarakat di beberapa kawasan pesisir di Kabupaten Karangasem. Adapun kontribusi dari masyarakat setempat dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata bahari yang berkelanjutan dapat disimak dari adanya beberapa kelompok masyarakat yang tergabung dalam Pokmaswas Bayu Segara Kecamatan Kubu, Kelompok Nelayan Tirta Wisata, Kelompok Porter Sekar Baruna dan *Desa Pakraman/Desa Dinas* dalam menjaga kelestarian lingkungan guna mengembangkan kebijakan kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan. Fenomena ini tidak saja terjadi di kawasan wisata Tulamben tetapi juga terjadi di kawasan wisata bahari lainnya di Kabupaten Karangasem, seperti yang terjadi di Kawasan Wisata Bahari Yeh Malet, Padangbai, Pantai Pelabuhan Amuk, Pantai Perasi, dan Candidasa.

Pemberdayaan masyarakat pesisir tentu saja akan dapat membuka peluang bagi terwujudnya harapan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kue pariwisata secara berkeadilan, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin meningkat dan kesenjangan sosial semakin menyempit. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya berbagai bentuk diversifikasi usaha yang dikembangkan oleh masyarakat setempat. Hal itu sesuai dengan harapan masyarakat setempat akan adanya keterlibatan tenaga kerja lokal, produk lokal dan adanya kontribusi dalam proses pembangunan di desa setempat. Untuk itulah masyarakat desa setempat membentuk forum dialog antar ketiga pilar masyarakat. Untuk itu dalam pengembangan pariwisata bahari perlu adanya pengembangan regulasi yang lebih berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga berbagai komponen masyarakat ikut merasakan nikmatnya kue pariwisata. Kondisi

semacam ini bila dapat diwujudkan tentu saja akan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat baik dalam pengembangan maupun dalam menjaga keberlangsungan pariwisata bahari itu sendiri. Harapan semacam itu adalah wajar, karena bagaimanapun masyarakat setempat harus mendapatkan peningkatan kesejahteraan hidup. Hal ini sejalan dengan konsepsi pariwisata berkelanjutan yang menekankan adanya keberlanjutan secara ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan alam. Adanya peningkatan kesejahteraan dan kemandirian dari masyarakat di daerah tujuan wisata tentu saja merefleksikan ketercapaian tujuan dari pemberdayaan masyarakat.

Berpijak dari konsepsi dan fenomena tersebut maka sesungguhnya pemberdayaan adalah sebuah proses untuk meningkatkan kapasitas seseorang atau kelompok orang untuk bisa melakukan pilihan-pilihan serta mengubah keputusan tersebut ke dalam langkah nyata untuk mendapatkan hasil atau manfaat yang diharapkan (Pitana, 2011:3). Harapan pengembangan pariwisata yang mensejahterakan bagi masyarakat setempat juga sejalan dengan tujuan pembangunan pariwisata.

Harapan masyarakat seperti itu tentu juga terkait dengan adanya berbagai fenomena pembangunan yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat setempat. Sebagai ilustrasi misalnya tidak jarang terjadi pembangunan pariwisata bahari menimbulkan masalah penggusuran pada masyarakat nelayan, pengusaha lokal, terpentalnya sumber manusia setempat. Harapan lainnya dari tokoh masyarakat di daerah-daerah tujuan wisata adalah adanya upaya-upaya untuk secara terus menerus melakukan upaya pengonstruksian pengembangan pariwisata bahari berbasis tri hita karana. Karena melalui hal inilah baru dimungkinkan untuk menghindari adanya pengembangan pariwisata yang tidak jelas arahnya.

Sebagaimana dikatakan oleh Prof. Sutjaya yang menyatakan sangat khawatir terhadap laju pertumbuhan pariwisata Bali. Karena Bali telah dieksploitasi secara liar. Tidak jelasnya regulasi untuk melindungi Bali dari pengembangan pariwisata yang dikelola dengan pendekatan kepentingan dan kolusi. Lebih lanjut dikatakan memang harus diakui bahwa pariwisata telah melaju pertumbuhan ekonomi Bali. Namun sejalan dengan hal itu kehancuran alam Bali juga semakin menguat. Hal itu mempresentasikan adanya kesenjangan antara teks ideal dengan teks sosial pada masyarakat Bali. Sehubungan dengan hal itulah maka banyak kalangan tokoh-tokoh intelektual kritis mendorong untuk melakukan rekonstruksi pariwisata Bali, termasuk juga pariwisata bahari, untuk mengembangkan pariwisata yang berkeadilan dan mensejahterakan msyarakat setempat, khususnya di kawasan pesisir Kabupaten Karangsem.

Hal semacam itu tampaknya telah diupayakan baik oleh pemerintah setempat maupun oleh kelompok masyarakat lainnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya kontribusi pengusaha pariwisata bahari

membantu pembiayaan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, membantu dalam menyosialisasikan pengembangan pelestarian lingkungan, secara rutin memberikan bantuan dana kepada Pemerintah *Desa Pakraman* dan Desa Dinas, serta adanya keterserapan tenaga kerja lokal dalam pengelolaan pariwisata bahari.

Kondisi semacam itu menuntut adanya upaya penginvestasian modal budaya, modal sosial, serta mengembangkan model kontrol sosial sebagai suatu alternatif dalam meredam konflik (Coleman, 2011: 415; Field, 2010: 100 ). Dalam konteks itulah pentingnya adanya kelembagaan yang dapat memperkuat atau berkontribusi positif dalam pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan. Dalam konteks ini masyarakat desa di kawasan pesisir telah mengembangkan berbagai kelembagaan seperti *pecalang segara*, Diving Center, Pokmaswas, sampai Badan Usaha Milik Desa.

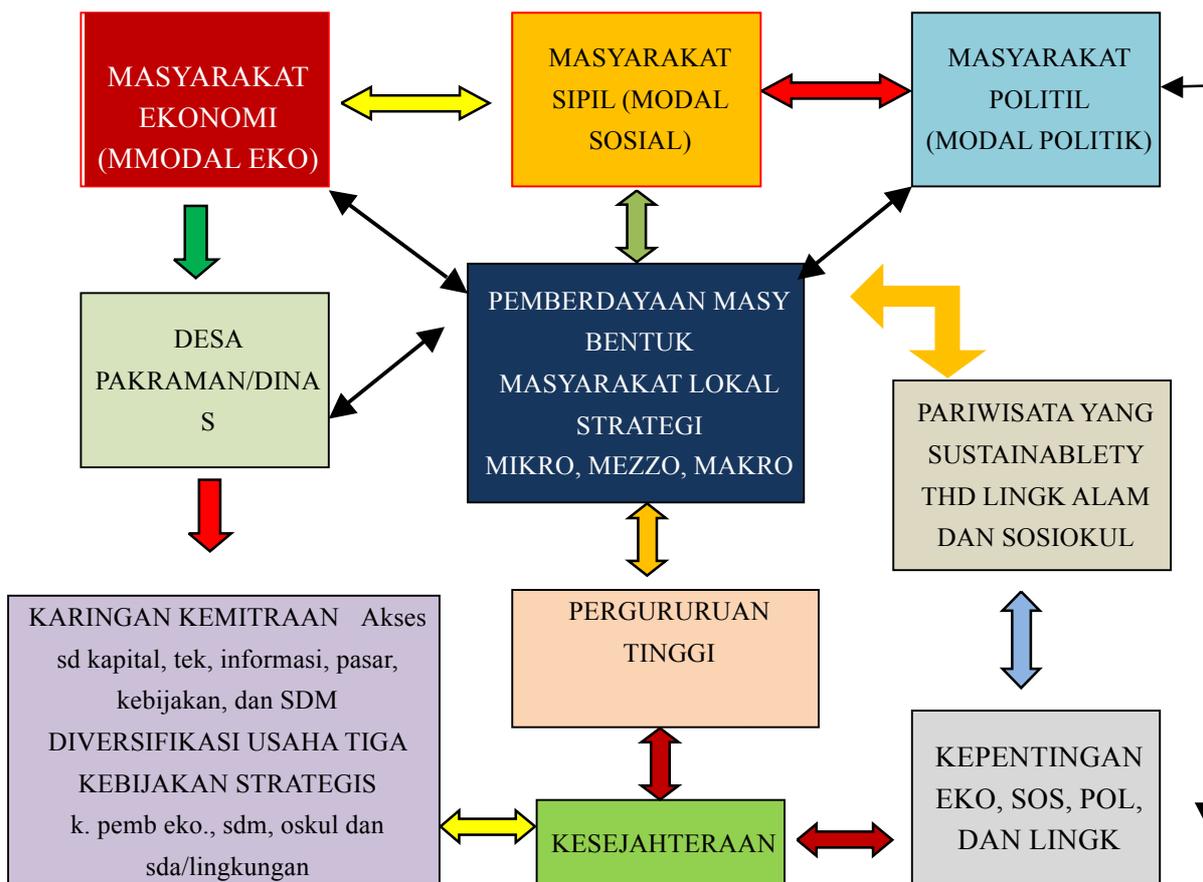
Kesadaran semacam itu tentu saja akan berkontribusi bagi berkembangnya pariwisata secara berkelanjutan baik keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosiokultural dari masyarakat setempat. Keberlanjutan lingkungan misalnya dapat dilihat dari adanya kelestarian terumbu karang sampai saat ini. Keberlanjutan ekonomi dapat dilihat dari terus berkembangnya usaha pariwisata dan adanya peningkatan kehidupan berbagai komponen masyarakat. Sedangkan keberlanjutan sosiokultural dapat dilihat dari tetap kuatnya nilai-nilai *Tri Hita Karana*, *Nyegara Gunung*, *Pecalang Segara*, *Desa Pakraman*, berbagai tari tradisional dan berbagai ritual keagamaannya. Dalam dinamika usahanya masyarakat ekonomi selalu berusaha bekerja sama dengan pihak lain, utamanya dengan masyarakat politik, sebagaimana terjadi di Desa Tulamben, Padang Bai, dan Candidasa. Kerja sama dengan masyarakat politik penting, karena kemampuannya dalam menjaga ketertiban umum, keamanan, dan kesejahteraan masyarakatnya (Bocock, 2007: 34-35).

Keterlibatan masyarakat politik dalam proses pemberdayaan masyarakat untuk pengembang wisata bahari dapat dilihat dari dukungan berbagai SKPD terhadap proses pemberdayaan masyarakat baik dalam pengembangan kesadaran pelestarian lingkungan/khususnya terumbu karang maupun dalam pengembangan pariwisata bahari. Sebagaimana ditunjukkan oleh upaya-upaya yang dilakukan SKPD Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karangasem dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pelestarian lingkungan/khusus terumbu karang, pembentukan Pokmaswas, *Pecalang Segara*, dan pemberdayaan kelompok nelayan. Dukungan semacam itu juga tampak dari upaya SKPD Kebudayaan dan Pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat guna pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan.

Masyarakat sipil merupakan pilar ketiga yang di dalamnya mencakup LSM, atau lembaga gerakan masyarakat baru. (Effendy, 2002: 3-7; Setiawan, 1996: 51). Dalam pemberdayaan masyarakat LSM yang berperan aktif di kawasan pesisir Kabupaten Karangasem adalah LSM Conservation Internasional Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam pemberdayaan masyarakat di kawasan pesisir ketiga pilar tersebut bersinergi dalam sebuah kekuatan yang saling mengimbangi, saling mengontrol, saling memberi, saling menopang, dan pada akhirnya memberikan sinergi untuk memajukan keadaban.

Kolaborasi antara masyarakat ekonomi politik dan sipil dalam pemberdayaan guna pengembangan pariwisata yang sustainability terhadap lingkungan alam dan sosiokultural untuk kesejahteraan bersama dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkontribusi bagi terwujudnya kepentingan bersama maupun kepentingan bagikelompok masyarakat tertentu. Hal yang harus terus disadari bahwa masing-masing kelompok masyarakat tidak dapat bekerja sendiri-sendiri dalam melaksanakan pembangunan termasuk dalam mengembangkan pariwisata yang mensejahterakan, melainkan harus saling berinteraksi, berdialog, dan bekerja sama. Idealnya ketiga pilar tersebut tumbuh dalam sebuah kekuatan yang saling mengimbangi, saling mengontrol, saling menopang, dan pada akhirnya bersinergi untuk memajukan keadaban. Kolaborasi masyarakat ekonomi, politik dan sipil juga didukung oleh kelembagaan perguruan tinggi. Kelembagaan perguruan tinggi dalam hal ini Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas Udayana, Universitas Panji Sakti, Sekolah Tinggi Agama Hindu, Institut Hindu Dharma, Universitas Hindu, turut berperan aktif dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kontribusi dari setiap perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat terkait dengan implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian kolaborasi dari tiga tiang masyarakat dalam hal ini masyarakat ekonomi, politik dan civil dalam mewujudkan pariwisata bahari yang berkelanjutan akan semakin mantap dengan adanya dukungan dari kelembagaan perguruan tinggi. Model pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata bahari yang sustainability dapat digambarkan pada bagan 1 berikut:



Dimodifikasi dari Kusnadi, 2001, Mudana, 2001, Mudana, 2015)

Masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap model pola pemberdayaan dalam pelestarian lingkungan alam dan sosiokultural yang dilakukan untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan terhadap lingkungan, sosiokultural masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dukungan masyarakat terhadap berbagai upaya yang dilakukan baik yang bersifat melembaga maupun yang bersifat personal. Sebagaimana nampak dari dukungan kelembagaan *Desa Pakraman*, *Desa Dinas*, dan *Pecalang Segara*.

Pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan tentu dilandasi dengan regulasi yang jelas. Dalam kaitannya dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Karangasem mengacu pada aturan perundang-undangan, ada dua undang-undang yang menjadi referensi hukum, yaitu: 1) Undang-undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan 2) Undang-undang No.27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 3) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 4)UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. 5) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 6) UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. 7) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Peisir dan Pulau-Pulau Kecil. 9) Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan No.17 Tahun 2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kec. 10) Perda Tk.I Bali No. 3 Tahun 1974 *jucto* Perda TK.I Bali No. 3 Tahun 1991 tentang Pariwisata Budaya. 11) Perda Prov. Bali No.3 Tahun 2005 tentang RTRW Provinsi Bali. 12) Perda Prov. Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. 13) Perda Prov. Bali No.7 Tahun 2007 tentang Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta. 14) Perda No. 16 Tahun 2009 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Provinsi Bali. Dan 15) Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem. Di samping peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah, masyarakat pesisir juga mengembangkan peraturan dalam bentuk *pararem*, baik yang terkait dengan pemanfaatan lingkungan, pengembangan pelestarian lingkungan, pemanfaatan sumber daya manusia dan mengenai masalah kontribusi pengembangan wisata bahari terhadap *Desa Dinas* dan *Desa Pakraman* setempat.

Regulasi yang dikembangkan selama ini berbasis *Desa Pakraman* yang pengembangan aturannya diambil melalui *pararem desa*, mengacu pada *awig-awig Desa Pakraman* dan *pararem desa* dijiwai oleh kearifan sosiokultural. Di masa depan masyarakat desa di kawasan pesisir perlu mengembangkan berbagai peraturan desa yang lebih komprehensif dan detail baik sebagai penjabaran lebih lanjut dari aturan perundangan yang lebih tinggi, maupu sebagai penjabaran lebih lanjut dari *Awig-awig Desa Pakraman* dan *Pararem Desa Pakraman*. Tentu saja regulasi yang dikembangkan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk pemberdayaan dan penyosialisasian ke pada berbagai komponen masyarakat, sehingga seluruh anggota masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan yang dikembangkan.

Pengembangan model pola pemberdayaan dalam pelestarian lingkungan alam dan sosiokultural guna pengembangan pariwisata yang berkelanjutan didukung oleh berbagai fenomena sosiokultural masyarakat setempat seperti *ideologi nyegara gunung*, *tri hita karana*, *menyama beraya*, *tatwam asi*, *asah*, *asih asuh*, dan *sagilik saguluk sabayan taka*, *asah*, *asih*, *asuh*. Fenomena soikultural semacam itu tentu saja tidak saja memberikan penguatan terhadap model pola pemberdayaan, tetapi juga akan dapat memperkuat keharmonisan dan integrasi masyarakat. Pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan di Kabupaten Karangasem tentu saja juga menghadapi berbagai hambatan terutama sekali yang terkait dengan regulasi, dukungan infrastruktur, kondisi sumber daya manusia, serta modal usaha yang terbatas.

Wisata bahari sangat tergantung pada sejauh mana masyarakat mampu menjaga dan meningkatkan kualitas objek wisata bahari, kenyamanan wisatawan, keamanan, keramahan anggota masyarakat. Hal ini terkait dengan fungsi hukum yang bersifat korektif dan perpektif dalam menciptakan kepastian, kejelasan

arah dan kebermaknaan pembangunan bagi masyarakat. Fungsi korektif dimaksudkan untuk memperbaiki kekeliruan dalam pelaksanaan pembangunan. Sedangkan fungsi perfektif dimaksudkan untuk menyempurnakan keadaan yang sudah baik ke arah keadaan yang mendekati kesempurnaan. Tujuannya adalah agar lebih banyak lagi anggota masyarakat yang dapat merasakan manfaat positif dari kinerja pengaturan kehidupan masyarakat (Tuwo, 2011: 147). Dalam konteks inilah perlu adanya sinergi antara berbagai komponen masyarakat, dalam hal ini antara masyarakat ekonomi (pengusaha pariwisata)

#### IV PENUTUP

##### A Simpulan

Berdasarkan atas hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola pemberdayaan yang dikembangkan adalah pola sinergi antara pola pendekatan dari atas dan dari bawah, sinergi antara masyarakat politik, ekonomi, dan sipil, serta dengan memanfaatkan institusi dan kultur masyarakat setempat. Secara umum masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap model pola pemberdayaan dalam pelestarian lingkungan alam dan sosiokultural yang dilakukan untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan terhadap lingkungan, sosiokultural masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari dukungan masyarakat terhadap berbagai upaya yang dilakukan baik yang bersifat melembaga maupun yang bersifat personal. Sebagaimana nampak dari dukungan kelembagaan *Desa Pakraman*, *Desa Dinas*, *Pecalang Segara*. Regulasi yang dikembangkan selama ini berbasis *Desa Pakraman* yang pengembangan aturannya diambil melalui *pararem desa*, mengacu pada awig-awig *desa pakraman* dan *pararem desa* dijiwai oleh kearifan sosiokultural.
2. Masyarakat setempat mengembangkan berbagai bentuk diversifikasi usaha, seperti pengembangan usaha Pelatihan *Diving*, Pemandu *Dive*, *Satpam*, *Massage*, *snorkling*, pemandu wisata bawah laut, penyewaan perahu, peralatan renang, juru angkut alat-alat berenang menyelam, tukang pijat, pedagang cindramata, dan warung makan.
3. Sehubungan dengan hal itu diperlukan adanya pengembangan kelembagaan dalam mengelola berbagai potensi dan menjaga kelestariannya. Dalam konteks inilah kelembagaan *desa pakraman* dan *desa dinas* yang ada di kawasan pesisir mengembangkan kelembagaan kelompok sadar wisata, *Diving Center* (Pelatihan/tutorial, penyewaan, pendampingan/pemandu wisata), kelompok nelayan pengangkut wisatawan, pelestarian terumbu karang, *pecalang segara*, dan Pokmaswas. Dalam menunjang keberadaan objek wisata bahari masyarakat pesisir juga menetapkan daerah perlindungan laut berbasis

masyarakat dengan dijiwai moto karang lestari nelayan sejahtera. Upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di satu sisi dilakukan dengan pengembangan kelembagaan pengelolaan dan pengawasan berbagai potensi yang dimiliki, di sisi yang perlu adanya kelembagaan pengembangan pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki masyarakat di kawasan pesisir. Dalam konteks inilah keberadaan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa memiliki peran penting sehingga kue yang dihasilkan melalui pengembangan pariwisata bahari dapat dinikmati oleh masyarakat secara bersama dan berkeadilan.

4. Walaupun demikian harus juga diakui bahwa dalam pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan ada beberapa hambatan yang dihadapi, misalnya dalam hubungan dengan regulasi yang terkait dengan kewenangan pengelolaan yang masih dipegang oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Bali. Selain masalah regulasi masalah yang juga menjadi hambatan adalah keterbatasan dukungan infrastruktur di objek wisata bahari, seperti jalan, tempat parkir, dan pengembangan dermaga yang kurang memadai. Hal ini dapat dilihat dari kondisi dermaga Tanah Ampo yang kurang memadai, yang kondisi hanya dapat menambatkan kapal dengan panjang 120 meter. Sedangkan kapal cruise paling kecil memiliki panjang 300 meter. Dengan kondisi seperti itu praktis dermaga ini tidak dapat difungsikan secara optimal. Hal yang sama juga terjadi di dermaga Jemeluk/Amed. Hambatan yang lain adalah yang terkait dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia, hal ini terkait dengan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat pesisir.

#### **B Saran-saran**

Berpijak dari hal tersebut dapat disarankan beberapa hal yang perlu dilakukan:

1. Perlu adanya penelitian lanjutan guna mengembangkan pola/model pemberdayaan dalam pengembangan wisata bahari
2. Perlu adanya upaya dari berbagai kelompok masyarakat untuk menjaga keberlanjutan pengembangan pariwisata bahari di Kabupaten Karangasem.
3. Perlu adanya upaya pembinaan secara berkelanjutan dalam menjaga keberlanjutan pengembangan wisata bahari

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anom, I Putu, Dkk. (2010). *Pariwisata Berkelanjutan dalam Pusaran Krisis Global*. (Kumpulan Karangan). Denpasar: Udayana University Press
- Amanah, S. (2010). Peran Komunikasi Pembangunan alam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*. ISSN 1693-3699 Februari 2010, Vol. 08, No. 1

- Arieta, Siti. (2010). *Community Based Tourism* Pada Masyarakat Pesisir; Dampaknya Terhadap Lingkungan dan Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Dinamika Maritim*. Vol. 2 No.1, September 2010`
- Atmadja, Nengah Bawa. (1993). *Pengelolaan Hutan Wisata Kera Sangeh Oleh Desa Adat Sangeh*, Bali. Dalam *Ekonesia Vol 1, No.1. Mei 1993*. Jakarta: UI
- \_\_\_\_\_. (2005), *Bali Pada Era Globalisasi*, Singaraja: IKIP N Singaraja Badaruddin, (2005), *Modal Sosial (Sosial Capital) dan Pemberdayaan Komunitas Nelayan*, dalam *Isu-isu Kelautan dari Kemiskinan Hingga Bajak Laut*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bagja, Gmelina Asri Muara, dkk. (2016). Masyarakat Pesisir di Kawasan Wisata Bahari Pantai Pandawa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung Provinsi Bali. *Jurnal Perikanan Kelautan*. Vol. VII No. 2 /Desember 2016 (91-96)
- Berger, Peter L, Thomas Luckmann. (1990). *Tafsir Sosial atas Kenyataan Rialah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_, (1991). *Langit Suci Agama Sebagai Realitas Sosial*. Jakarta: LP3ES. Bocock, Robert. (2007). *Pengantar Komprehensif Untuk Memahami Hegemoni*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Citra, I Putu Ananda. (2017). Strategi Pemberdayaan Masyarakat untuk Pengembangan ekowisata Wilayah Pesisir di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*. P-ISSN: 2303-2898 Vol. 6, No.1, April 2017| 31
- Coleman, James S. (2011). *Dasar-Dasar Teori Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Covarrubias, Miguel. (2012). *Pulau Bali*. Denpasar: Udayana University Press.
- Dewi, Made Heny Urmila. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Kawistara* Volume 3 No. 2, 17 Agustus 2013 Halaman 117-226
- Dwiyanto, Bambang Munas. (2011). Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Penguatan Sinergi Alam Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 12, Nomor 2, Desember 2011, hlm.239
- Effendy, Muhadjir. (2002). *Masyarakat Equilibrium*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Elyazar, Nita, dkk. (2007). Dampak Aktivitas Masyarakat Terhadap Tingkat Pencemaran Air laut di pantai Kuta Kabupaten Badung Serta Upaya Pelestarian Lingkungan. *Ecotrophic*. Issn 1907-5626 |Volume 2 No. 1 Mei 2007
- Etzioni, Amitai. (1985), *Organisasi-Organisasi Modern*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Field, John. 2010). *Modal Sosial*. Bantul: Kreasi Wacana.
- Foucault, Michel. (1997). *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Moder*. Yogyakarta: LKiS.
- Hasbullah, Jousairi. (2006). *Sosial Capital, Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*, Jakarta: MR-United Press.
- Keraf, A.Sonny. (2002). *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas.
- Kusnadi. (1997). Diversifikasi Pekerjaan di Kalangan Nelayan, dalam *Prisma*, No.7/97. Jakarta: LP3ES.
- \_\_\_\_\_. (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: LKiS.

- Mudana, I Wayan. (1998). *Terhimpit di balik Lipatan Dolar ( Kajian Antropolog Terhadap Kehidupan Nelayan Pada Kawasan Pemukiman Wisata di Pantai Bali Utara)*, Singaraja: STKIP.
- \_\_\_\_\_. (2001). Kredit Sosial dan Kredit Ekonomi pada Masyarakat Nelayan di Desa Kubutambahan, *Tesis S2 Kajian Budaya*. Denpasar: UNUD.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Idologi Nyegara Gunung*. Sebuah Kajian Sosikultural Kemiskinan Pada Masyarakat Pesisir di Bali Utara. Singaraja: Undiksha.
- \_\_\_\_\_. (2014). Pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Daerah Tujuan Wisata Desa Pemuteran. Singaraja: Undiksha
- \_\_\_\_\_. (2015). Pola Pemberdayaan Masyarakat Pada Dearah Tujuan Wisata Bahari di Kabupaten Karangasem, (*Laporan Penelitian*) Singaraja: Undiksha.
- Najib, Ufi. (2006). Aplikasi Teori Post Modernisme Terhadap Aspek Pemberdayaan Masyarakat (Community Emprowerment) Daerah Tujuan Wisata, dalam *Pustaka Vol VI, No.11 Tahun 2006*. Denpasar; Fakultas Sastra UNUD.
- Nugroho, Iwan. (1997). "Modal Sosial dan Pembangunan Kota". Dalam *Prisma. No. 6/1997*. Jakarta: LP3ES.
- Pitana. (1998). Transformasi Desa Adat, *Makalah* , Singaraja: STIE.
- \_\_\_\_\_. (2011). Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata, dalam *Pemberdayaan dan Hiperdemokrasi dalam Pembangunan Pariwisata*, (Penyunting: I Nyoman Darma Putra dan I Gde Pitana). Denpasar: Pustaka Larasan.
- Pujaastawa, I.B.G, dkk.. (2005). *Pariwisata Terpadu*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Ritzer, George. (2003). *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi
- Setiawan Bonnie. (1996). "Masyarakat Sipil dan Organisasi Nonpemerintah". Dalam *Majalah Prisma. No. 7/1996*. Jakarta: LP3ES.
- Suharto, Edi. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. (1998). *Pembangunan Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tuwo, H.Ambo. (2011). *Pengelolaan Ekowisata Pesisir dan Laut. Pendekatan Ekologis, Sosial-ekonomi, Kelembagaan, dan Sara Wilayah*. Sidoarjo: Brilian Internasional